

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebakaran hutan yang terjadi di Riau telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang langsung berefek kepada kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan ini LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membangun jaringan transnasionalnya dengan jaringan *Friends of the Earth International* (FoEI). Upaya WALHI dan FoEI dalam menangani dampak kebakaran hutan di Riau tahun 2015 dianalisis menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional, tulisan dari Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink. Ada empat indikator yang akan dianalisis, yakni politik informasi, politik simbolik, memanfaatkan politik, politik akuntabilitas.

Pertama, politik informasi yang mana WALHI dan FoEI bertukar informasi sehingga dapat melakukan pembingkaihan sebuah isu menjadi permasalahan kepentingan publik dan menjadikan permasalahan kolektif yang menuntut tindakan. Dalam hal ini WALHI memberikan informasi melalui website dan youtube resmi yang menyediakan informasi-informasi terkait kebakaran hutan, seperti luas kebakaran, kerugian serta dampaknya. Kemudian WALHI dan FoEI juga mengadakan konferensi pers terkait advokasi nasional penyelamatan kebakaran hutan. Selain itu, WALHI membentuk kelompok tim investigasi *Eyes on th Forest* (EOF) bersama WWF yang bertujuan memberikan berita terkait kejahatan hutan di

Indonesia, kegiatan LSM, tindakan pemerintah dan perusahaan serta siaran pers yang bertujuan mendapatkan perhatian dari masyarakat terkait isu kebakaran hutan di Riau.

Kedua, politik simbolik yaitu cara yang digunakan WALHI dan FoEI setelah informasi didapat yang mana mereka akan membingkai sebuah permasalahan dengan cara membawa peristiwa simbolis yang bertujuan mendorong orang lain terlibat dan menambah pertumbuhan jaringan. Dalam hal ini WALHI dan FoEI menggunakan tagar untuk memudahkan masyarakat melihat kasus ini, seperti #melawanasap, #pulihkanIndonesia, #Pulihkangambut. Selain itu adanya politik simbol berupa peristiwa-peristiwa seperti, *Paris Agreement*, Konferensi Bioiversitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana hal ini menegaskan kembali posisi dan menarik atensi masyarakat internasional.

Ketiga, politik mempengaruhi yaitu kemampuan untuk menggambarkan situasi dimana aktor yang memiliki *power* dapat mengendalikan situasi dan berpengaruh. Dalam hal ini tekanan-tekanan yang dilakukan WALHI dan FoEI seperti pada pemerintahan UNni Eropa terkait kebakaran hutan di Riau memberikan pengaruh moral, dimana WALHI bisa memperkuat kerja pemerintah dalam proses penegakan hukum. WALHI dan FoEI mendapat legitimasinya mengkampanyekan isu kebakaran hutan di Riau.

Terakhir, politik akuntabilitas yaitu usaha yang digunakan dengan membantu aktor-aktor berpengaruh untuk bertindak dalam kebijakan yang mereka sokong. Dalam hal ini WALHI dan FoEI melakukan tuntutan terhadap aktor-aktor yang bertanggung jawab langsung atas terjadinya kebakaran hutan di Riau seperti pemerintah dan perusahaan-perusahaan sawit. Tuntutan ini seperti komitmen yang

WALHI dan FoEI minta kepada korporasi-korporasi yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di Riau

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini yakni bentuk upaya-upaya jaringan advokasi transnasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dengan FoEI dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan pemerintah lebih memperhatikan dan menindak tegas oknum-oknum perusak lingkungan serta dapat memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga lain yang juga bergerak dibidang lingkungan

Maka dari itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam lagi permasalahan kebakaran hutan dan lahan, kemudian menganalisisnya menggunakan analisis yang lebih kompleks. Sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik dan dapat menjadi input bagi kebijakan pihak berwenang.

